



Prodi Ekonomi  
Syariah

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 1, No. 1  
Januari-Juni 2017  
Halaman: 21-28

# Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Dana Otonomi Khusus dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016

Cut Dian Fitri, Winny Dian Safitri, Muhammad Reza Fahlefi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Submit 4 Januari 2017

Revisi 3 Februari 2017

Diterima 2 April 2017

#### Kata Kunci:

Poverty,  
Principal Component Analysis,  
Poverty Levels

### ABSTRACT

*The research is conducted to find out the change of poverty level of group, the spread of poverty level, and the conception of the correlation between special autonomy fund and expenditure per capita on district/city poverty level in Aceh Province in 2012-2016. The data used in this research is the outsus fund of Aceh, Aceh per capita expenditure data and Aceh poverty percentage data from 2012 to 2016 is sourced from the Badan Pusat Statistik (BPS) of Aceh Province, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) and other sources related to the research problem. The method used to analyze poverty level is principal component analysis. The results of this study indicate that the poverty level of the group is divided into three categories, namely high, medium and low categories. The regions with high poverty rates from 2012-2016 were Gayo Lues District, while the regions with low poverty levels from 2012-2016 were Banda Aceh City, Langsa City, and Lhokseumawe City. The distribution of the poverty level in Aceh is strongly influenced by neighboring areas. There is a strong relationship between special autonomy funds and expenditure per capita on poverty levels, indicated by the number of districts / cities that are in quadrant I.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan kelompok, persebaran tingkat kemiskinan, dan gambaran hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dana outsus Aceh, data pengeluaran perkapita Aceh dan data persentase kemiskinan Aceh tahun 2012-2016 yang berasal Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan adalah metode analisis komponen utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Gayo Lues, sedangkan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang rendah dari tahun 2012-2016 yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Persebaran tingkat kemiskinan Aceh sangat dipengaruhi oleh daerah yang berdekatan. Ada hubungan kuat antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan ditandai dengan banyaknya kabupaten/kota yang berada pada kuadran I.

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang sangat penting serta menjadi perhatian utama di berbagai negara, kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi tolak ukur bagi pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan baik negara maupun daerah.

Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Hasilnya, selama periode 1976-1996 (Repelita II - V), tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara drastis yaitu dari 40% di awal Repelita II menjadi 11% pada awal Repelita V (Mubyarto, 2003). Catatan gemilang tersebut tidak terlepas dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pembangunan tersebut, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh di atas 7 persen tiap tahunnya. Keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan ini kemudian mendapat banyak pujian dari masyarakat dunia. Laporan World Bank (1993) yang bertajuk: *"The East Asian Miracle"*, menempatkan Indonesia menjadi salah satu macan Asia dalam daftar *"The High Performing Asian*

\* Corresponding author: Cut Dian Fitri  
E-mail address: [cutdianfitri@ar-raniry.ac.id](mailto:cutdianfitri@ar-raniry.ac.id)

*Economies (HPAEs)*" sejajar dengan Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Singapura (Purwanto, 2007). Sehingga menjadikan nama Indonesia naik pada level dunia, akan tetapi pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami penurunan ditandai krisis moneter.

Provinsi Aceh juga ikut merasakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai dari tahun 1998 dan 2008. Pada tahun 2016 persentase tingkat kemiskinan Provinsi Aceh sebesar 17,11%. Dengan ini menjadikan Provinsi Aceh peringkat ketujuh daerah dengan persentase tingkat kemiskinan yang tinggi setelah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Bengkulu. Jika dihitung dari peringkat dengan persentase kemiskinannya di wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Aceh menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Bengkulu.

Dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh tiap tahunnya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masih banyak kebijakan pemerintah Aceh dalam penggunaan dana tersebut lebih mementingkan pembangunan kantor yang megah dan kepentingan elit politik partai lokal di Aceh sebagai mayoritas tunggal. Sedangkan program pembangunan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat masih minim.

Perekonomian di Aceh bisa dilihat dengan besarnya pertumbuhan perkapita melalui pendapatan maupun pengeluaran. Dalam penelitian ini penulis ingin mengukurnya dengan menggunakan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik makanan maupun non-makanan selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk (BPS, 2017).

Dalam jurnal Erwan Agus Purwanto (2007) usaha kecil menengah bisa dijadikan sebagai strategi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia, namun karena kurangnya perhatian pemerintah Orde Baru ke sektor ini dan preferensi rezim Orde Baru lebih besar perhatiannya ke perusahaan, sehingga sektor ini telah menjadi keterbelakangan. Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang baik dari sektor usaha kecil menengah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Dalam jurnal Shinta Warouw, Grace Nangoy, dan Treesje Runtu (2016) bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Anggaran Otonomi Khusus yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Kota Sorong senantiasa mengalami peningkatan, selalu terealisasi penuh dan tidak terjadi penyimpangan.

Dari penjelasan diatas, penulis menganggap adanya keterkaitan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan sehingga perlu adanya penelitian khusus untuk menganalisis pengelompokan tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh guna membantu Pemerintah Aceh dalam proses pembangunan untuk mewujudkan Provinsi Aceh agar sejahtera. Adapun yang ingin diteliti pada penelitian ini yaitu bagaimana perubahan tingkat kemiskinan kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan dana otsus dan pengeluaran perkapita dari tahun 2012-2016, bagaimana persebaran tingkat kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2012 sampai tahun 2016, bagaimana gambaran hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan.

---

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### Pengertian kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2018).

### Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikannya seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah maupun

kepada manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia dan zalim kepada dirinya sendiri (Qardhawi, 2005). Landasan Hukum Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

### **Pengertian Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus**

Sesuai dengan UUD Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Sedangkan Dana Otonomi Khusus, yaitu dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 'tertentu' untuk membangun sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada daerah tertentu agar dapat menata lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya (UUD, 1945).

Manfaat Dana Otonomi Khusus dengan adanya limpahan dana otonomi khusus seharusnya Provinsi Aceh harus lebih maju atau menjadi pendorong kuat untuk mengejar ketertinggalan akibat konflik dan bencana. Keberhasilan kinerja di Aceh setidaknya mensyaratkan pada akumulasi dari produktifitas setiap komponen pembangunan untuk menyumbangkan produktifitasnya demi tercapainya percepatan pembangunan dan kemandirian.

### **Pengertian Pengeluaran Perkapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik makanan maupun non-makanan selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk (BPS, 2017).

## **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerik atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh relasi hubungan antara variabel penelitian. Dalam penelitian ini membahas tentang hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode analisis komponen utama dengan bantuan *software* MINITAB 16, Microsoft Excel dan *software* ArcGIS. Sehingga diperoleh hasil agar dapat ditarik kesimpulan.

### **Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder, meliputi data persentase kemiskinan, dana otonomi khusus, dan pengeluaran perkapita tahun 2012 hingga 2016. Adapun data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **Tahapan Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mendapatkan model tingkat kemiskinan adalah metode analisis komponen utama dengan bantuan *software* MINITAB 16, Microsoft Excel dan *software* ArcGIS. Sebelum melakukan analisis, data ditransformasi kepeubah baku, hal ini dikarenakan oleh satuan pengukuran untuk peubah dalam penelitian ini tidak sama.

Selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data persentase tingkat kemiskinan, dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016.
- b. Mencari rata-rata semua peubah dari data tahun 2012 sampai 2016.
- c. Melakukan analisis komponen utama terhadap data rata-rata.
- d. Menentukan banyaknya  $k$  komponen utama (KU) dari data rata-rata.
- e. Mencari skor komponen utama ( $W$ ) dari komponen utama (KU) yang terpilih.
- f. Melakukan analisis *cluster* terhadap data skor komponen utama ( $W$ ) untuk data rata-rata.
- g. Melakukan analisis komponen utama terhadap data pertahun, kemudian menggunakan vektor ciri atau koefisien  $a_{ij}$  yang diperoleh melalui Analisis komponen utama untuk memperoleh  $k$  skor komponen utama ( $W$ ) tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.
- h. Mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan kategori besar kecilnya perubahan.  
Kategori kelompok tingkat kesejahteraan rakyat masing-masing kabupaten/kota ke- $h$  dapat dinotasikan sebagai berikut :

1) Tinggi, jika  $y_{h1} > \underline{y}_1 + s_{y1}$

Merupakan daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinannya paling parah di bandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016.

2) Sedang, jika  $\underline{y}_1 - s_{y1} \leq y_{h1} \leq \underline{y}_1 + s_{y1}$

Merupakan daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinannya stabil di bandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016.

3) Rendah, jika  $y_{h1} < \underline{y}_1 - s_{y1}$

Merupakan daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinannya baik karena terjadi penurunan di bandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016 (Vincent, 1992).

- i. Menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari pengelompokan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.
- j. Membuat peta pengelompokan tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh

#### 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

##### **Perubahan tingkat kemiskinan kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan dana otsus dan pengeluaran perkapita dari tahun 2012-2016**

Tingkat kemiskinan kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Gayo Lues, sedangkan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang rendah dari tahun 2012-2016 yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe, selebihnya berada pada kategori sedang. Namun pada tahun 2016 Kabupaten Pidie Mengalami perubahan yang sebelumnya berada pada kategori sedang masuk dalam kategori tinggi.

##### **Persebaran tingkat kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2012 sampai tahun 2016.**

Persebaran tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa daerah yang berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan daerah yang berada pada tingkat kemiskinan yang rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun daerah yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Bireun.

##### **Gambaran Hubungan Antara Dana Otsus dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2012-2016.**

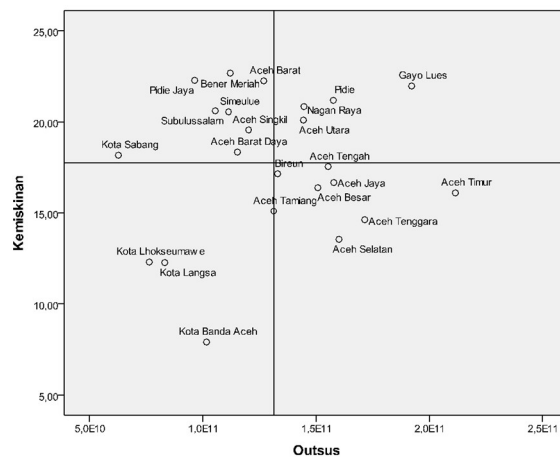
Adapun gambaran hubungan antara dana otsus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan menjadi tolak ukur dalam hasil penelitian ini. Besar atau kecilnya hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

### a. Hubungan Antara Dana Otsus Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.

Jika ditinjau dari tujuannya, salah satu tujuan dana otsus untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh.

Pada gambar dibawah akan dijelaskan hasil dari penelitian ini mengenai seberapa besar hubungan dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.

#### Hubungan antara dana otsus terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh



Pada kuadran pertama menjelaskan bahwa dana otsus meningkat tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini memberikan gambaran buruk karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya dengan dana otsus yang meningkat tingkat kemiskinannya juga semakin berkurang. Adapun penyebabnya karena korupsi dan tata kelola dana otonomi khusus yang belum baik sehingga terjadi tingginya tingkat kemiskinan. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran pertama yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Tengah.

Pada kuadran kedua menjelaskan bahwa dana otsus sedikit tingkat kemiskinannya tinggi. Hal ini tentu menjadi acuan untuk menambah jumlah dana otsus agar tingkat kemiskinannya menurun. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran kedua yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.

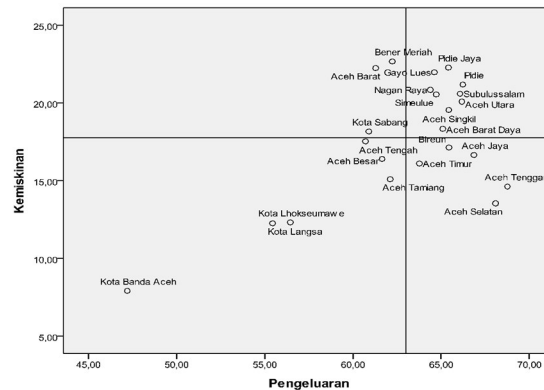
Pada kuadran ketiga menjelaskan bahwa dana otsus sedikit tingkat kemiskinannya menurun. Dalam kuadran ini dianggap sangat baik, karena dengan dana otsus yang sedikit kemiskinannya juga menurun. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran ketiga yaitu Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh.

Pada kuadran keempat menjelaskan bahwa dana otsus meningkat tingkat kemiskinannya menurun. Dalam kuadran keempat ini sangat baik, karena berhasil memanfaatkan dana otsus untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran keempat yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Tamiang berada diantara kuadran ketiga dan kuadran keempat.

### b. Hubungan Antara Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh

Pengeluaran perkapita melambangkan tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan disuatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok baik dari segi makanan maupun non-makanan. Pada gambar dibawah akan dijelaskan hasil dari penelitian ini mengenai seberapa besar pengaruh pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.

## Hubungan antara pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh



Pada kuadran pertama menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita meningkat tingkat kemiskinannya juga tinggi. Dalam hal ini memberikan gambaran buruk, seharusnya dengan pengeluaran perkapita yang tinggi kemiskinan juga menurun. Adapun penyebabnya karena daya beli masyarakat yang berkurang sehingga terjadi tingginya tingkat kemiskinan akibat dari ketidakmampuan masyarakat dalam membeli barang. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran pertama yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kota Subulussalam.

Pada kuadran kedua menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita sedikit tingkat kemiskinannya meningkat. Dalam hal ini memberi gambaran buruk pula seharusnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan maka pengeluaran perkapita juga harus meningkat sehingga terjadi perputaran roda perekonomian yang baik. Adapun kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran kedua yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat, dan Kota Sabang.

Pada kuadran ketiga menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita sedikit tingkat kemiskinannya menurun. Pada kuadran ini memberi gambaran yang baik karena dengan pengeluaran perkapita yang sedikit mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran perkapita melambangkan kemampuan daya beli masyarakat untuk konsumsi. Alangkah lebih baiknya lagi apabila pengeluaran perkapita tinggi tingkat kemiskinannya rendah. Adapun kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran ketiga yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Banda Aceh.

Pada kuadran keempat menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita meningkat tingkat kemiskinannya rendah. Dalam kuadran ini sangat baik, karena pengeluaran perkapitanya tinggi tingkat kemiskinannya juga rendah. Sehingga terjadi perputaran roda perekonomian yang bagus. Adapun kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran keempat yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Analisa data dengan analisis komponen utama (AKU) dan analisis *cluster* untuk analisa data rata-rata tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini ialah:

- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat kemiskinan kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Gayo Lues, sedangkan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang rendah dari tahun 2012-2016 yaitu Kota Banda Aceh, Kota

Langsa, dan Kota Lhokseumawe, selebihnya berada pada kategori sedang. Namun pada tahun 2016 Kabupaten Pidie Mengalami perubahan yang sebelumnya berada pada kategori sedang masuk dalam kategori tinggi.

- b. Persebaran tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa daerah yang berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan daerah yang berada pada tingkat kemiskinan yang rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun daerah yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Bireun.
- c. Ada hubungan kuat antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan ditandai dengan banyaknya kabupaten/kota yang berada pada kuadran I. Artinya semakin tinggi dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita, tingkat kemiskinan juga semakin tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena tata kelola dana otonomi khusus kabupaten/kota yang belum tepat sasaran.

## Rekomendasi

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan pada penelitian ini ialah:

- a. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap kabupaten/kota yang berada dalam kategori tingkat kemiskinan yang tinggi.
- b. Pendistribusian dana otonomi khusus harus dapat dikontrol dengan baik, sehingga tepat guna. Peningkatan dan penurunan pengeluaran perkapita menjadi pola penting yang menjadi catatan dalam proses pembangunan yang adil dan merata.
- c. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil variabel yang lebih banyak untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang ada di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh.
- d. Diharapkan untuk pemerintah Aceh kedepannya agar melakukan pembangunan lebih merata.
- e. Alangkah baiknya daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinan yang tinggi dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie diberi bantuan pupuk, bibit, mesin penggiling dan sebagainya agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membangun produktifitas sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abdul Hayy. (1994). *Metode Tafsir Muwdu'iy (Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudlu')*. Suryana A. Jamrah (penj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arif Mudayat, Aris. (1996). *Ulama dan Uleebalang di Aceh: Konsistensi Ideologi Islam. Dalam kisah dari kampung halaman, masyarakat suku, agama resmi dan pembangunan.* Jakarta: Interfdei.
- Aceh Dalam Angka. (2014). Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Haris, Syamsudin. (1999). *Indonesia di Ambang Perpecahan.* Jakarta: Erlangga.
- Huda, Nurul. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iriansyah, Nova. (2016). *Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan dan Kemandirian Bagi Kota Otonomi Khusus. Banda Aceh.*
- Kholis, Nur. (2014). "pendidikan islam dalam usaha mengatasi kemiskinan." Kependidikan 1-14
- M. H. A. Laimeheriwa. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Dan Kabupaten Provinsi Papua [skripsi]. Salatiga (ID): Universitas Kristen Satya Wacana.
- Nurhayani. (2012). *Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita Di Kabupaten Batanghari* [jurnal]. Jambi (ID): Universitas Jambi
- Nurwati, Nunung. (2008). *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan* [jurnal]. Bandung (ID): Universitas Padjadjaran.
- Prawoto, Nano. (2009). *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya* [jurnal]. Yogyakarta (ID): Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Purwanto, E. A. (2007). *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia* [jurnal]. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat*. Alih Bahasa Narulita, Sari. Jakarta: Zikrul Hakim.
- S.Warouw, G.Nangoy, Treesje. (2016). *Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di Provinsi Papua Barat* [skripsi]. Manado (ID): Universitas Sam Ratulangi.
- Syahda Guru LS. (2000). *Menimbang otonomi vs federal*, PT.Remaja Rosdakarya Bandung.
- Wargadinata, Wildana. (2011). *Islam dan pengentasan kemiskinan*. UIN-Maliki Press, Malang.